



Penguatan Moderasi Beragama pada Pendidikan di Indonesia

*Yuni Armayanti¹, Zakiah Nasution²

Institut Agama Islam Rokan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

*Correspondence Address: yuniarmayanti313@gmail.com

ABSTRACT

Religious moderation has become a strategic issue in Indonesian education amid increasing socio-religious complexity and the potential for ideological fragmentation within educational settings. However, its implementation remains uneven and has not yet been fully integrated into educational practices. This article aims to analyze and synthesize the strengthening of religious moderation in Indonesian education based on a comprehensive literature review. The research employs a library research method by examining academic literature, national policy documents, and relevant empirical studies on religious moderation and education. The findings indicate that strengthening religious moderation is effective when implemented through synergy among educational policies, curriculum integration, the strategic role of teachers, school leadership, institutional culture, and contextual-reflective pedagogical approaches. The study concludes that religious moderation cannot be implemented in a partial or fragmented manner, but rather requires an integrative and sustainable approach as part of a holistic educational ecosystem. The implications of this study highlight the importance of strengthening educators' capacity, ensuring policy consistency, and fostering collaboration among schools, families, and communities to promote inclusive, tolerant education and reinforce national character formation.

Key Words: Religious Moderation; Education; Islamic Education; National Character; Literature Review

ABSTRAK

Moderasi beragama menjadi isu strategis dalam pendidikan di Indonesia seiring meningkatnya kompleksitas tantangan sosial-keagamaan dan potensi fragmentasi ideologis di lingkungan pendidikan. Namun, implementasi moderasi beragama masih menunjukkan variasi dan belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik dalam praktik pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis penguatan moderasi beragama dalam pendidikan di Indonesia berdasarkan kajian pustaka yang komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis literatur akademik, dokumen kebijakan nasional, serta hasil penelitian relevan terkait moderasi beragama dan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama dalam pendidikan efektif ketika diimplementasikan melalui sinergi antara kebijakan pendidikan, integrasi kurikulum, peran strategis guru, kepemimpinan sekolah, budaya kelembagaan, serta pendekatan pedagogis yang kontekstual dan reflektif. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa moderasi beragama tidak dapat diimplementasikan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan integratif dan berkelanjutan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas pendidik, konsistensi kebijakan, serta kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas dalam membangun pendidikan yang inklusif, toleran, dan berorientasi pada penguatan karakter kebangsaan.

Kata Kunci: Moderasi Beragama; Pendidikan; Pendidikan Islam; Karakter Kebangsaan; Kajian Pustaka

ARTICLE INFO
Received
02 September 2025
Revised
05 Januari 2026
Accepted
08 Januari 2026
Published
08 Januari 2026

Penguatan Moderasi Beragama pada Pendidikan di Indonesia

Yuni Armayanti, Zakiah Nasution

To cite this article: Armayanti. Y., Nasution. Z. Penguatan Moderasi Beragama pada Pendidikan di Indonesia. *Journal of Islamic Education El Madani*. 5 (1), 59-75. (APA 7th Style)

This is an open access article under the CC-BY License

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



Penguatan Moderasi Beragama pada Pendidikan di Indonesia

Yuni Armayanti, Zakiah Nasution

Pendahuluan

Dalam dekade terakhir, dunia menghadapi peningkatan tajam dalam ketegangan sosial dan konflik yang dipicu oleh ekstremisme dan intoleransi berbasis agama. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara yang mengalami konflik terbuka, tetapi juga di masyarakat plural yang relatif stabil, termasuk Indonesia (Fenton, 2016). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan tingkat keragaman etnis serta agama yang tinggi, Indonesia memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kohesi sosial dan memperkuat nilai-nilai keberagamaan yang toleran. Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi konsep kunci yang diangkat oleh Pemerintah Indonesia sebagai strategi nasional guna merawat kebinekaan dan membentengi masyarakat dari ideologi radikal (Subchi et al., 2022). Pendidikan, sebagai institusi strategis dalam proses pembentukan karakter dan nilai, memiliki peran yang sangat krusial dalam menginternalisasikan prinsip-prinsip moderasi beragama kepada generasi muda (Wirian & Jf, 2025). Namun demikian, dinamika sosial yang berkembang menunjukkan bahwa praktik moderasi beragama di lembaga pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, baik pada level kebijakan, implementasi kurikulum, maupun persepsi aktor pendidikan. Oleh karena itu, penelitian yang mendalami penguatan moderasi beragama dalam ranah pendidikan menjadi semakin relevan dan mendesak untuk dilakukan (Maharani, 2025).

Meskipun moderasi beragama telah menjadi wacana strategis dalam kebijakan nasional Indonesia, implementasinya dalam ranah pendidikan masih menunjukkan ketimpangan antara konsep normatif dan praksis di lapangan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pengarusutamaan nilai-nilai moderasi, seperti toleransi, keadilan, keseimbangan, dan anti-kekerasan, belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik dalam kurikulum, metode pembelajaran, serta kultur institusi Pendidikan (Mukhibat et al., 2024). Di beberapa konteks, pendekatan pedagogis yang kaku, minimnya pelatihan guru, dan bias ideologis turut menjadi faktor penghambat efektifnya internalisasi nilai moderasi dalam proses pendidikan. Selain itu, masih terdapat kesenjangan persepsi di kalangan tenaga pendidik, peserta didik, dan pengelola lembaga pendidikan terhadap pemahaman esensial tentang moderasi beragama, yang menyebabkan terjadinya resistensi, salah tafsir, bahkan praktik eksklusivisme di lingkungan sekolah dan kampus. Dalam kondisi tersebut, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana strategi penguatan moderasi beragama yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mampu diinternalisasi secara transformatif dalam ekosistem pendidikan di Indonesia? Pertanyaan ini menjadi dasar penting untuk mengkaji lebih jauh kompleksitas tantangan yang dihadapi, sekaligus mencari pendekatan yang lebih kontekstual, inklusif, dan aplikatif guna menjembatani antara idealitas kebijakan dan realitas praksis pendidikan (Mukhibat et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi penguatan moderasi beragama dalam konteks pendidikan di Indonesia dengan pendekatan yang holistik dan berbasis pada realitas empiris. Secara umum, studi ini diarahkan untuk mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai moderasi beragama telah diinternalisasikan dalam sistem pendidikan, baik melalui kebijakan nasional, desain kurikulum, praktik pedagogis, maupun budaya institusional di lembaga pendidikan formal. Tujuan khusus dari penelitian ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, mengidentifikasi pendekatan kebijakan dan inisiatif strategis yang telah diterapkan oleh pemerintah dan institusi pendidikan dalam mendorong moderasi beragama. Kedua, menggali persepsi dan pengalaman aktor-aktor pendidikan termasuk guru, dosen, siswa, dan pengelola lembaga terhadap konsep, nilai, dan praktik moderasi beragama dalam kehidupan akademik sehari-hari. Ketiga, merumuskan rekomendasi kebijakan dan model implementatif yang dapat memperkuat efektivitas program moderasi beragama di lingkungan pendidikan. Dengan tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan pendidikan yang inklusif, toleran, dan resilien terhadap ancaman ideologis yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan.

Kajian mengenai moderasi beragama dalam konteks pendidikan Indonesia telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, namun sebagian besar masih terbatas pada eksplorasi

Penguatan Moderasi Beragama pada Pendidikan di Indonesia

Yuni Armayanti, Zakiah Nasution

konseptual atau pendekatan deskriptif normatif yang belum menyentuh dimensi praksis secara mendalam. Berbagai studi terdahulu umumnya berfokus pada aspek kebijakan makro, seperti peran negara dalam membingkai moderasi beragama melalui regulasi dan program nasional, tanpa menggali secara komprehensif bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan diterima di tingkat institusi pendidikan (Afwadzi & Miski, 2021). Selain itu, penelitian yang mengkaji persepsi dan keterlibatan langsung aktor pendidikan seperti guru, dosen, siswa, dan pengelola lembaga terhadap nilai-nilai moderasi masih sangat terbatas. Celah lain yang belum banyak disentuh adalah absennya kerangka evaluatif yang integratif untuk mengukur efektivitas strategi moderasi beragama dalam ekosistem pendidikan, baik dalam aspek kurikulum, pedagogi, maupun budaya institusional. Oleh karena itu, diperlukan studi yang mampu menjembatani celah antara teori dan praktik, serta menyusun model konseptual yang kontekstual dan berbasis pada temuan empiris (Mukhibat et al., 2024). Penelitian ini hadir untuk merespons kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan yang lebih aplikatif dan berorientasi solusi terhadap penguatan moderasi beragama di lingkungan pendidikan.

Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan (novelty) melalui pendekatan integratif yang menggabungkan dimensi normatif-konseptual dengan bukti empiris dalam mengkaji penguatan moderasi beragama pada ranah pendidikan di Indonesia (Dzofir & Nur, 2024). Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang cenderung berfokus pada tataran kebijakan atau wacana teoritik, penelitian ini secara eksplisit menghadirkan perspektif multipihak melibatkan guru, dosen, peserta didik, dan pemangku kebijakan pendidikan untuk membangun pemahaman yang utuh tentang dinamika internalisasi nilai moderasi beragama di tingkat institusi. Selain itu, studi ini juga berupaya mengembangkan model konseptual berbasis temuan lapangan yang dapat digunakan sebagai instrumen analisis maupun evaluasi kebijakan pendidikan berbasis nilai-nilai moderasi. Justifikasi ilmiah dari penelitian ini terletak pada urgensi akademik dan praktis untuk memperkuat resiliensi ideologis masyarakat Indonesia terhadap radikalisme dan intoleransi, yang sebagian akar permasalahannya berasal dari lemahnya pendidikan karakter berbasis inklusivitas dan toleransi. Di tengah kompleksitas sosial dan tantangan globalisasi identitas, penelitian ini tidak hanya relevan secara teoritik dalam memperkaya literatur pendidikan dan studi keagamaan, tetapi juga strategis secara praktis dalam mendukung transformasi pendidikan menuju arah yang lebih pluralistik, dialogis, dan berkeadaban.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, komprehensif, dan kritis terhadap tema penguatan moderasi beragama dalam pendidikan di Indonesia (Togia & Malliari, 2017). Studi kepustakaan dinilai relevan karena fokus penelitian terletak pada eksplorasi teoritis dan analisis konseptual terhadap literatur ilmiah yang membahas keterkaitan antara pendidikan Islam dan nilai-nilai moderasi beragama dalam konteks sosial, budaya, dan kebijakan nasional.

Data dikumpulkan melalui telaah sistematis terhadap berbagai sumber yang dianggap otoritatif dan sahih, seperti buku akademik, artikel jurnal ilmiah terindeks, laporan penelitian, regulasi pemerintah, dokumen kebijakan publik, dan publikasi resmi dari lembaga terkait, baik nasional maupun internasional. Seluruh sumber yang dianalisis dipilih berdasarkan relevansi substansialnya terhadap isu pendidikan Islam dan moderasi beragama, serta validitas ilmiah yang terjamin. Dalam proses pengumpulan data, dilakukan penelusuran pustaka melalui basis data ilmiah seperti Scopus, Sinta dan Google Scholar.

Teknik analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis isi (content analysis) dengan tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi kritis, dan penarikan kesimpulan tematik (Elo

Penguatan Moderasi Beragama pada Pendidikan di Indonesia

Yuni Armayanti, Zakiah Nasution

et al., 2014). Fokus utama analisis diarahkan pada identifikasi prinsip-prinsip moderasi dalam dokumen pendidikan, peta pemikiran akademik terkait penguatan moderasi beragama, serta model-model integrasi nilai moderasi dalam kurikulum dan praktik pendidikan. Tujuan analisis ini adalah untuk melacak secara argumentatif posisi strategis pendidikan Islam dalam membangun ekosistem sosial yang inklusif, toleran, dan dialogis sebagai bagian dari penguatan moderasi beragama.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsepsi Islam Moderat dan Moderasi Beragama

Konsep Islam moderat atau *al-Islām al-wasathī* merupakan paradigma keagamaan yang menekankan keseimbangan (*tawāzun*), keadilan (*‘adl*), toleransi (*tasāmuh*), serta penolakan terhadap ekstremisme (*ghuluw*) dalam keyakinan dan praktik keberagamaan (Helmy et al., 2021). Dalam Al-Qur’an, umat Islam disebut sebagai *ummatan wasāṭan* (QS. Al-Baqarah: 143), yakni umat yang berada di jalan tengah, tidak condong pada eksklusivisme berlebihan maupun liberalisme tanpa batas. Pemahaman ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga berdimensi sosiologis dalam konteks kemasyarakatan modern yang plural. Moderasi beragama bertujuan mendorong sikap terbuka, apresiatif terhadap perbedaan, serta menolak bentuk-bentuk kekerasan atas nama agama (Arif, 2021). Di Indonesia, konsep ini menemukan legitimasi kuat dalam praktik keagamaan berbasis tradisi lokal, sebagaimana tercermin dalam doktrin *Islam Nusantara* oleh Nahdlatul Ulama dan *Islam Berkemajuan* oleh Muhammadiyah dua organisasi keagamaan terbesar yang mengedepankan nilai-nilai perdamaian, kebangsaan, dan kemanusiaan. Moderasi beragama bukan sekadar strategi responsif terhadap ancaman radikalisme, melainkan menjadi fondasi penting dalam merawat integrasi sosial, menjaga kohesi nasional, dan membangun peradaban yang inklusif. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki peran strategis dalam menerjemahkan nilai-nilai moderasi ke dalam proses pembelajaran, kebijakan institusional, serta pembentukan karakter generasi muda secara berkelanjutan (Nurul Laily Nuzulia, Abdul Jalil, 2024).

Islam moderat atau *wasathiyah* merupakan paradigma keberagamaan yang bercirikan keseimbangan, keadilan, dan penolakan terhadap segala bentuk ekstremisme dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama (Alvian & Ardhani, 2023). Secara terminologis, konsep *wasathiyah* berasal dari akar kata *wasatha* yang dalam bahasa Arab berarti "pertengahan", dan digunakan dalam Al-Qur’an untuk menggambarkan umat Islam sebagai *ummatan wasāṭan* (QS. Al-Baqarah: 143), yakni umat yang adil, seimbang, dan menjadi saksi bagi umat lain. Konsep ini menolak keberagamaan yang bersifat eksklusif, intoleran, atau radikal, dan sebaliknya mendorong umat untuk mengedepankan prinsip moderasi dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Prinsip-prinsip utama dari Islam moderat meliputi *tawazun* (keseimbangan antara hak dan kewajiban, dunia dan akhirat), *i’tidal* (keadilan dalam penilaian dan tindakan), serta *tasamuh* (toleransi terhadap perbedaan agama, budaya, dan pandangan). Islam moderat juga mengandung semangat anti-ekstremisme (*anti-ghuluw*), yaitu penolakan terhadap pemahaman agama yang berlebihan, keras, atau menyesatkan. Dengan demikian, *wasathiyah* bukan hanya menjadi kerangka teologis, melainkan juga menjadi prinsip etis dan praksis dalam kehidupan sosial keagamaan yang inklusif dan humanis, yang sangat relevan dengan realitas keberagaman Indonesia sebagai negara multikultural (Alvian & Ardhani, 2023).

Dalam praktiknya, konsep *wasathiyah* tidak berdiri sendiri sebagai teori keagamaan abstrak, melainkan telah dijadikan sebagai kerangka berpikir dalam menjawab tantangan kehidupan modern, khususnya di tengah realitas masyarakat yang majemuk. Moderasi beragama meniscayakan keterbukaan terhadap keragaman (*al-ta‘addudiyah*), pengakuan terhadap hak-hak sipil warga negara lintas agama, serta partisipasi aktif umat Islam dalam membangun masyarakat damai yang berkeadaban. Dalam konteks ini, moderasi beragama bukanlah relativisme nilai, tetapi komitmen terhadap prinsip-prinsip universal Islam yang berpihak pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan

Penguatan Moderasi Beragama pada Pendidikan di Indonesia

Yuni Armayanti, Zakiah Nasution

keseimbangan. Sejumlah pemikir Muslim kontemporer seperti Abdullah Saeed (2006) dan Tariq Ramadan (2009) mengembangkan pemahaman *wasathiyah* sebagai pendekatan hermeneutis dan etis dalam menafsirkan teks keagamaan secara kontekstual dan relevan dengan problematika masyarakat saat ini.

Di Indonesia, gagasan moderasi beragama telah memperoleh penguatan kelembagaan sejak diluncurkannya *Grand Design Moderasi Beragama* oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Dokumen tersebut menegaskan empat indikator utama moderasi beragama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Keempatnya mencerminkan manifestasi konkret dari prinsip-prinsip *wasathiyah* dalam ruang publik nasional. Secara historis, nilai-nilai moderasi telah lama menjadi fondasi utama dalam kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia, khususnya yang difasilitasi oleh organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Keduanya menjadi representasi dari Islam Indonesia yang berwatak inklusif, menolak kekerasan, dan mengedepankan peran keagamaan dalam kerangka kebangsaan. Seperti ditegaskan dalam studi (Ikhwan et al., 2023), pemaknaan Islam moderat harus terus dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial yang terus berubah agar dapat menjadi basis ideologis dalam merespons radikalisme dan intoleransi yang masih mengancam keutuhan bangsa.

Dengan demikian, konsepsi Islam moderat tidak hanya penting sebagai dasar normatif keagamaan, tetapi juga strategis sebagai pendekatan pedagogis dalam dunia pendidikan. Nilai-nilai *wasathiyah* harus diinternalisasikan melalui sistem pendidikan, baik dalam kurikulum maupun kultur institusional, guna membentuk generasi yang tidak hanya religius tetapi juga toleran, adil, dan inklusif dalam merespons keberagaman (Subaidi, 2020). Hal ini menjadi landasan awal yang krusial bagi penguatan moderasi beragama pada pendidikan di Indonesia.

2. Peran Pendidikan Agama Islam dalam Memperkuat Moderasi Beragama

Pendidikan Agama Islam (PAI) menempati posisi strategis dalam proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama, khususnya dalam membentuk generasi yang toleran, inklusif, dan menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama (Hikmah & Ernawati, 2023). Sebagai instrumen ideologis sekaligus praksis dalam sistem pendidikan nasional, PAI tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan ajaran normatif Islam, tetapi juga harus memainkan peran transformatif dalam membentuk kesadaran beragama yang humanis dan kontekstual. PAI memiliki potensi besar untuk menanamkan nilai-nilai toleransi (*tasāmuh*), saling menghormati perbedaan, serta menjunjung prinsip *ukhuwah insāniyyah* yang menjadi inti ajaran Islam rahmatan lil ‘ālamīn. Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, internalisasi nilai ini sangat mendesak, mengingat meningkatnya kecenderungan eksklusivisme dan fragmentasi sosial akibat penyalahgunaan agama sebagai alat legitimasi konflik sosial.

Temuan (Ikhwan et al., 2023) menegaskan bahwa PAI memiliki kapasitas kuat dalam mempromosikan nilai-nilai damai dan mendorong pemahaman keagamaan yang akomodatif terhadap pluralitas sosial. Namun demikian, efektivitas internalisasi ini sangat bergantung pada pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Jika PAI hanya disampaikan secara dogmatis dan tekstual, tanpa mendorong refleksi kritis dan dialog interaktif, maka potensi radikalisme dan intoleransi justru bisa muncul sebagai hasil dari indoktrinasi sempit. Oleh karena itu, PAI harus didesain sebagai ruang dialogis yang membuka kemungkinan bagi peserta didik untuk memahami agama secara kontekstual, mendalam, dan terbuka terhadap perbedaan.

Dalam model pendidikan yang ideal, nilai-nilai anti-kekerasan ditanamkan melalui keteladanan guru, narasi-narasi inklusif dalam materi ajar, serta pengalaman belajar yang mendorong empati dan tanggung jawab sosial. Pendidikan agama yang hanya mengajarkan aspek ritual dan doktrinal tanpa menyentuh etika sosial dan nilai-nilai universal Islam akan kehilangan fungsinya sebagai agen

Penguatan Moderasi Beragama pada Pendidikan di Indonesia

Yuni Armayanti, Zakiah Nasution

perdamaian. Maka, pendidikan agama harus menjadi media transformasi yang mendorong peserta didik menjadi agen-agen moderasi yang berperan aktif dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat integrasi bangsa. Pendidikan Agama Islam (PAI) berada dalam ketegangan dialektis antara dua kutub pandangan yang saling bertolak belakang: di satu sisi sebagai instrumen integrasi sosial dan penguatan kohesi kebangsaan, namun di sisi lain juga berpotensi menjadi ruang reproduksi konservatisme dan radikalisme jika tidak dikelola secara kritis dan kontekstual. Pandangan pertama menempatkan pendidikan agama sebagai media strategis dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan harmoni antarumat beragama. Dalam kerangka ini, pendidikan agama difungsikan untuk menanamkan pemahaman Islam sebagai agama damai yang menekankan prinsip *ukhuwah wathaniyah*, *ukhuwah insaniyah*, dan *ukhuwah Islamiyah*, serta mampu menjembatani keberagaman dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Studi (Raikhan & Moh. Nasrul Amin, 2023) memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa guru PAI yang dibekali pemahaman moderasi beragama dapat menjadi aktor kunci dalam mendorong pembelajaran yang inklusif, reflektif, dan dialogis, sehingga mampu membentengi siswa dari pemahaman keagamaan yang ekstrem dan menyimpang.

Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran yang cukup valid bahwa pendidikan agama yang disampaikan secara literal, eksklusif, dan normatif semata justru dapat memperkuat konservatisme keagamaan. Ketika kurikulum dan metode pengajaran PAI gagal mengakomodasi dinamika sosial dan keberagaman pandangan, maka ruang kelas berpotensi menjadi tempat berkembangnya paham keagamaan yang sempit, rigid, dan intoleran. Hal ini diperkuat oleh sejumlah riset nasional yang mencatat adanya peningkatan kecenderungan radikalisme di kalangan pelajar dan mahasiswa, yang sebagiannya berakar dari praktik pengajaran agama yang tidak dialogis dan tidak kontekstual (PPIM UIN Jakarta, 2019; (Ikhwani et al., 2023). Dalam banyak kasus, apatisme terhadap nilai pluralisme dan kecenderungan takfiri tidak muncul secara spontan, melainkan tumbuh dari narasi keagamaan yang bersifat hitam-putih, penuh klaim kebenaran tunggal, dan minim kesadaran historis maupun sosial.

Ketegangan ini menunjukkan bahwa pendidikan agama bukan entitas netral, melainkan arena ideologis yang sangat ditentukan oleh desain kurikulum, kapasitas guru, serta paradigma epistemologis yang mendasarinya. Oleh karena itu, urgensi transformasi pendidikan agama menjadi semakin mendesak, yakni dari sekadar transmisi doktrin menuju pembentukan kesadaran kritis dan etika keberagaman yang kontekstual. Dalam kerangka ini, pendidikan agama harus diposisikan sebagai alat rekonsiliasi sosial dan pembentuk karakter kebangsaan, bukan sebagai sumber polarisasi ideologis.

Urgensi reformasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi semakin jelas di tengah kompleksitas tantangan ideologis dan kultural yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Kurikulum PAI yang bersifat doktrinal, tekstualistik, dan minim ruang reflektif tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan peserta didik yang hidup dalam realitas sosial yang plural dan dinamis (RF & Nursobah, 2024). Oleh karena itu, perlu dilakukan pergeseran paradigma dari pendidikan agama yang berorientasi pada hafalan dan kognisi normatif menuju pendidikan yang bersifat dialogis, kontekstual, dan transformatif. Dalam konteks ini, pendekatan pembelajaran kritis menjadi instrumen utama dalam membentuk kesadaran keberagaman yang moderat, inklusif, dan toleran. Pendidikan agama harus mampu merangsang daya nalar peserta didik untuk mempertanyakan, merefleksikan, dan mengonstruksi kembali makna ajaran agama dalam relasinya dengan kemanusiaan dan kebangsaan. Reformasi kurikulum juga harus mencakup perumusan capaian pembelajaran yang menekankan nilai-nilai *wasathiyah*, serta pengembangan bahan ajar yang mencerminkan kompleksitas kehidupan beragama dalam masyarakat multikultural. Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian (Nurdaeni et al., 2024), integrasi nilai-nilai moderasi dalam *Kurikulum Merdeka* merupakan langkah awal yang menjanjikan dalam membentuk karakter siswa yang menjunjung

Penguatan Moderasi Beragama pada Pendidikan di Indonesia

Yuni Armayanti, Zakiah Nasution

prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesatuan dalam keberagaman. Namun demikian, reformasi kurikulum tidak akan efektif tanpa diikuti dengan penguatan kapasitas guru sebagai fasilitator dialog dan agen perubahan di ruang kelas. Guru PAI harus dibekali dengan kompetensi pedagogis dan wawasan keagamaan yang moderat agar mampu menyampaikan materi ajar secara kritis dan kontekstual, serta menghindari penyebaran narasi yang bersifat eksklusif atau diskriminatif.

Selain itu, reformasi pendidikan agama juga menuntut keberanian institusi untuk membuka ruang pembelajaran yang melibatkan wacana lintas agama, studi komparatif, serta pengalaman-pengalaman sosial yang membentuk empati antarumat beragama (Lukin, 2017). Dalam kerangka ini, pendidikan agama bukan hanya sarana pembentukan identitas keislaman yang partikular, tetapi juga wahana pembangunan karakter kewargaan yang kosmopolit. Reformasi kurikulum dan pembelajaran kritis ini menjadi prasyarat mendasar bagi terbangunnya ekosistem pendidikan yang mampu melahirkan generasi yang tidak hanya religius secara spiritual, tetapi juga cerdas secara sosial dan matang dalam menyikapi perbedaan.

3. Strategi Implementasi Moderasi Beragama di Satuan Pendidikan

3.1 Model di Madrasah

Madrasah sebagai institusi pendidikan berbasis agama memiliki peran strategis dalam pengarusutamaan moderasi beragama, terlebih karena madrasah secara historis dan struktural berada pada simpul antara nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Salah satu pendekatan implementatif yang terbukti efektif dalam memperkuat nilai-nilai moderasi di madrasah adalah melalui revitalisasi peran guru sebagai agen utama moderasi. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pengetahuan agama, tetapi juga sebagai model keteladanan dan fasilitator pembelajaran inklusif yang menumbuhkan semangat toleransi dan antikekerasan. Penelitian (Raikhan & Moh. Nasrul Amin, 2023) menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru melalui program pelatihan sistematis dan terarah mampu mendorong mereka untuk menginsersi nilai-nilai moderasi ke dalam proses pembelajaran, baik dalam ranah intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.

Salah satu pendekatan inovatif yang diterapkan adalah model *Community-Based Research* (CBR), yang mengintegrasikan praktik penguatan moderasi beragama dalam komunitas pendidikan dengan melibatkan guru, kepala madrasah, dan stakeholder lokal secara aktif dalam perumusan dan evaluasi program (Daheri et al., 2023). Melalui CBR, guru tidak hanya menjadi objek pelatihan pasif, melainkan aktor yang berpartisipasi penuh dalam mendesain intervensi pendidikan sesuai dengan konteks lokal masing-masing. Pendekatan ini juga memungkinkan terjadinya refleksi kritis dan kolaborasi horizontal antarpraktisi pendidikan, sehingga tercipta proses pembelajaran timbal balik yang memperkuat kesadaran ideologis dan pedagogis akan pentingnya moderasi beragama. Dalam praktiknya, hasil dari pelatihan dan pendampingan berbasis komunitas ini mendorong terciptanya program pembelajaran agama yang tidak hanya mengajarkan dimensi normatif-teologis, tetapi juga membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab kebangsaan di kalangan peserta didik.

Lebih jauh, pelaksanaan strategi ini di lingkungan madrasah juga telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan, di mana madrasah mulai mampu merumuskan kurikulum tematik moderasi, menyusun kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis nilai-nilai toleransi, serta memperkuat kerja sama dengan pihak eksternal, termasuk Kementerian Agama dan lembaga swadaya masyarakat. Model ini tidak hanya relevan untuk madrasah, tetapi juga dapat direplikasi di sekolah umum berbasis agama lainnya yang menghadapi tantangan serupa dalam membina pemahaman keagamaan yang inklusif. Oleh karena itu, revitalisasi peran guru melalui insersi kurikulum dan pendekatan komunitas

Penguatan Moderasi Beragama pada Pendidikan di Indonesia

Yuni Armayanti, Zakiah Nasution

merupakan strategi kunci dalam memastikan bahwa moderasi beragama tidak berhenti sebagai jargon kebijakan, melainkan terimplementasi secara nyata dalam praktik pendidikan.

3.2 Model di Sekolah Dasar

Implementasi moderasi beragama di tingkat Sekolah Dasar (SD) menemukan momentumnya melalui penerapan Kurikulum Merdeka, yang memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan dalam merancang pembelajaran berbasis karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Model ini memberikan ruang yang luas untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip moderasi seperti keadilan, keseimbangan, toleransi, dan anti-kekerasan ke dalam semua mata pelajaran, bukan hanya terbatas pada Pendidikan Agama Islam. Penelitian yang dilakukan oleh (Nurdaeni et al., 2024) di SDN Bengele menunjukkan bahwa penguatan karakter moderasi beragama telah berhasil diinternalisasikan melalui pendekatan terpadu antara visi-misi sekolah, pembelajaran tematik, serta pembiasaan nilai-nilai Pancasila dan Islam rahmatan lil 'ālamīn dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dalam konteks ini, guru memiliki peran sentral sebagai pengarah moral sekaligus fasilitator pembelajaran yang membentuk cara pandang siswa terhadap keberagaman dan kehidupan sosial.

Keunggulan Kurikulum Merdeka terletak pada fleksibilitasnya dalam mengakomodasi nilai-nilai lokal dan nasional secara simultan. Melalui integrasi lintas mata pelajaran, seperti Bahasa Indonesia, IPS, dan Seni Budaya, nilai-nilai moderasi dapat dikemas dalam bentuk narasi, praktik sosial, dan aktivitas reflektif yang membentuk kebiasaan berpikir dan bertindak siswa secara inklusif dan empatik. Lebih lanjut, pembelajaran tidak semata-mata berfokus pada kognisi, tetapi juga afeksi dan psikomotorik, yang mendorong siswa untuk mengalami langsung nilai-nilai moderasi dalam konteks konkret (Haris et al., 2024). Proses ini diperkuat dengan pengembangan budaya positif sekolah, yang mencakup praktik keteladanan guru, kegiatan rutin seperti doa bersama dan gotong royong, serta penanaman nilai melalui program ekstrakurikuler seperti pramuka, seni, dan literasi sosial.

Sekolah yang berhasil menerapkan model ini umumnya membangun sinergi antara kurikulum eksplisit dan kurikulum tersembunyi, di mana lingkungan sekolah berfungsi sebagai laboratorium sosial bagi pembentukan karakter siswa. Budaya sekolah yang positif, partisipatif, dan menghargai keberagaman menciptakan atmosfer yang kondusif bagi berkembangnya nilai-nilai moderasi sebagai habitus, bukan sekadar hafalan normatif. Meskipun tantangan masih muncul, seperti keterbatasan fasilitas dan beban administratif guru, model SDN Bengele membuktikan bahwa penguatan moderasi beragama dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, asalkan didukung oleh komitmen bersama antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan lingkungan sosial siswa. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka dapat menjadi instrumen strategis dalam membentuk generasi dasar yang toleran, inklusif, dan tangguh secara ideologis di tengah keberagaman Indonesia.

3.3 Penekanan Pada Peran Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dan Kolaborasi Kepala Sekolah, Guru, Dan Orang Tua.

Efektivitas implementasi moderasi beragama di lingkungan satuan pendidikan sangat ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai tersebut terintegrasi ke dalam sistem manajerial sekolah secara menyeluruh. Dalam hal ini, pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menjadi strategi krusial karena menempatkan sekolah sebagai entitas otonom yang memiliki kewenangan penuh dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial budaya lokal. Penerapan MBS membuka ruang partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan terutama kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua siswa dalam membangun visi dan program sekolah yang berpijak

Penguatan Moderasi Beragama pada Pendidikan di Indonesia

Yuni Armayanti, Zakiah Nasution

pada nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan keadaban. Sebagaimana diungkapkan dalam studi (Nurdaeni et al., 2024), keberhasilan penguatan moderasi beragama di SDN Bengle tidak hanya ditentukan oleh integrasi kurikulum, tetapi juga oleh kepemimpinan transformatif kepala sekolah dan budaya kolaboratif antarwarga sekolah.

Dalam kerangka MBS, kepala sekolah berperan sebagai pemimpin moral yang bertanggung jawab mengarahkan seluruh komponen sekolah pada tujuan pendidikan karakter, termasuk internalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Ini diwujudkan dalam bentuk perencanaan strategis berbasis visi misi sekolah, pengorganisasian struktur kelembagaan yang mendukung pembinaan karakter, serta pengawasan terhadap konsistensi implementasi program pada tataran praksis. Di sisi lain, guru menjadi ujung tombak dalam operasionalisasi nilai moderasi di ruang kelas, sementara keterlibatan orang tua berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai sekolah dengan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kolaborasi antara ketiga aktor ini memungkinkan terbentuknya ekosistem pendidikan yang konsisten dalam membentuk karakter siswa yang moderat.

MBS juga memungkinkan munculnya praktik-praktik inovatif dalam pengembangan program moderasi yang sesuai dengan konteks sosial sekolah masing-masing (Nurdaeni et al., 2024). Misalnya, pelibatan komite sekolah dalam forum musyawarah tahunan untuk menetapkan nilai-nilai karakter utama yang akan dikembangkan; pelaksanaan pelatihan guru dan parenting education bagi orang tua siswa; hingga pembentukan komunitas pembelajar antarwarga sekolah yang mendorong refleksi bersama mengenai praktik keberagaman yang toleran dan inklusif. Dengan demikian, MBS tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengelolaan administratif, tetapi menjadi fondasi strategis bagi transformasi nilai-nilai moderasi beragama menjadi praktik nyata dalam kehidupan sekolah.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Moderasi Beragama

4.1 Faktor Pendukung: Kompetensi guru dan kesiapan lembaga pendidikan; Dukungan kebijakan nasional

Keberhasilan implementasi moderasi beragama di lingkungan pendidikan tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung yang bersifat struktural maupun kultural. Salah satu faktor utama adalah kompetensi guru, baik dalam aspek pedagogis, psikologis, maupun teologis. Guru yang memiliki pemahaman komprehensif tentang nilai-nilai moderasi beragama serta kemampuan metodologis dalam menyampaikannya, akan mampu mentransformasikan kelas menjadi ruang dialogis yang membentuk cara pandang siswa secara inklusif, kritis, dan toleran. Penelitian (Raikhan & Moh. Nasrul Amin, 2023) menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berbasis komunitas dan workshop tematik dapat mendorong mereka menginternalisasikan nilai-nilai moderasi secara kreatif dan kontekstual dalam proses pembelajaran. Selain itu, kesiapan kelembagaan sekolah atau madrasah dalam mengintegrasikan nilai-nilai moderasi ke dalam kurikulum, program ekstrakurikuler, serta budaya institusional menjadi faktor krusial yang memperkuat keberlanjutan implementasi.

Faktor pendukung lainnya adalah dukungan kebijakan nasional yang memberikan landasan regulatif dan strategis bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan penguatan moderasi beragama (Qoumas et al., 2024). Salah satu kebijakan penting yang menjadi titik tolak adalah *Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 7272 Tahun 2019* tentang Implementasi Moderasi Beragama, yang menegaskan bahwa pendidikan moderasi bukan sekadar proyek ideologis, tetapi bagian integral dari strategi pendidikan nasional dalam membangun masyarakat yang toleran, damai, dan berkeadaban. Kebijakan ini diperkuat dengan masuknya moderasi beragama ke dalam *Rencana Strategis Kementerian Agama 2020–2024*, yang menempatkan penguatan nilai-nilai moderasi sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam reformasi pendidikan Islam

Penguatan Moderasi Beragama pada Pendidikan di Indonesia

Yuni Armayanti, Zakiah Nasution

di Indonesia. Konvergensi antara regulasi nasional dan kesiapan aktor lokal di tingkat sekolah menjadikan pelaksanaan program moderasi beragama semakin sistemik dan terukur. Kehadiran kebijakan yang progresif ini tidak hanya memberikan arah, tetapi juga legitimasi formal bagi inisiatif-inisiatif di tingkat akar rumput untuk merancang dan menjalankan pendidikan agama yang damai, adaptif, dan transformatif.

4.2 Faktor Penghambat: Keterbatasan Fasilitas, Miskonsepsi Tentang Moderasi, Resistensi Ideologis, Dan Pendekatan Dogmatis

Meskipun terdapat berbagai faktor pendukung, implementasi moderasi beragama di satuan pendidikan juga menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural yang signifikan. Salah satu penghambat utama adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya pendukung, baik dalam bentuk sarana pendidikan, materi ajar tematik, maupun akses terhadap pelatihan dan penguatan kapasitas guru. Di banyak madrasah dan sekolah, khususnya di wilayah non-perkotaan, program-program moderasi sering kali terhenti pada tataran wacana karena minimnya dukungan infrastruktur dan keberlanjutan program. Hal ini diperparah oleh absennya sistem evaluasi dan monitoring yang memungkinkan sekolah melakukan refleksi serta penyesuaian kebijakan internal secara berkelanjutan (Imamuddin & Kurniasari, 2024).

Selain persoalan teknis, miskonsepsi tentang konsep moderasi beragama juga menjadi penghambat serius. Dalam banyak kasus, moderasi disalahpahami sebagai bentuk relativisme agama, kompromi terhadap akidah, atau bahkan sekularisasi nilai-nilai Islam. Akibatnya, sebagian pendidik dan lembaga pendidikan menolak untuk mengintegrasikan pendekatan moderat karena dianggap bertentangan dengan prinsip keyakinan. Studi (Ikhwan et al., 2023) mencatat adanya kerancuan dalam memahami istilah “moderasi”, yang tidak jarang dimaknai secara sempit sebagai upaya ‘menengahi’ konflik teologis, bukan sebagai strategi etis dalam beragama di ruang sosial. Kekeliruan semantik ini menyebabkan terjadinya resistensi ideologis, terutama di lingkungan yang memiliki kecenderungan eksklusivisme keagamaan.

Lebih lanjut, resistensi ideologis menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Di beberapa sekolah dan madrasah, masih terdapat pengaruh kuat dari kelompok-kelompok yang mempromosikan paham keagamaan yang rigid, skripturalistik, dan kurang adaptif terhadap pluralitas (Dwi Kurniawan, 2024). Dalam konteks ini, setiap bentuk pembaruan dalam pendekatan PAI kerap ditolak atau dicurigai sebagai bentuk dekonstruksi terhadap kemurnian ajaran. Hal ini diperburuk oleh pendekatan pengajaran yang dogmatis, yang menempatkan siswa sebagai objek pasif dan membatasi ruang dialog kritis. Kurikulum yang berorientasi pada hafalan teks tanpa elaborasi nilai dan konteks sosial hanya akan melahirkan generasi yang lemah dalam berpikir reflektif, namun mudah terpapar ideologi eksklusif. Tanpa pembaruan pedagogi dan perubahan paradigma, pendidikan agama berpotensi menjadi instrumen reproduksi intoleransi (Lukin, 2017).

Dengan demikian, implementasi moderasi beragama memerlukan bukan hanya intervensi kebijakan dan pelatihan teknis, tetapi juga transformasi epistemologis dan kultural yang lebih dalam. Mengatasi hambatan ini menuntut pendekatan sistemik, yang menggabungkan literasi keagamaan kritis, reformasi metode pembelajaran, dan pembukaan ruang dialog yang konstruktif antara semua aktor pendidikan.

5. Implikasi Empiris dan Teoritis terhadap Pendidikan Islam

5.1 Pendidikan Agama Yang Mengintegrasikan Nilai-Nilai Moderasi Memiliki Pengaruh Signifikan Terhadap Pembentukan Karakter Kebangsaan Siswa

Integrasi nilai-nilai moderasi dalam pendidikan agama memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan karakter kebangsaan siswa, khususnya dalam membangun kesadaran kolektif

Penguatan Moderasi Beragama pada Pendidikan di Indonesia

Yuni Armayanti, Zakiah Nasution

akan pentingnya toleransi, persatuan, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan agama yang memuat prinsip *wasathiyah* tidak hanya mengajarkan dimensi normatif ajaran Islam, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kewargaan yang inklusif seperti penghormatan terhadap perbedaan, semangat dialog antaragama, dan penolakan terhadap kekerasan serta ujaran kebencian. Studi-studi kontemporer, termasuk yang dilakukan oleh (Raikhan & Moh. Nasrul Amin, 2023), menunjukkan bahwa peserta didik yang mengikuti program pembelajaran agama dengan pendekatan moderat cenderung memiliki tingkat empati sosial yang lebih tinggi, lebih terbuka terhadap keberagaman, dan lebih berorientasi pada kerukunan antarumat beragama dalam praktik keseharian mereka di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Karakter kebangsaan yang terbentuk melalui pendekatan ini juga mencakup pemahaman kritis terhadap nilai-nilai dasar konstitusi Indonesia, seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, yang dikontekstualisasikan dalam kerangka ajaran Islam yang rahmatan lil 'ālamīn. Pendidikan agama semacam ini tidak hanya membentengi siswa dari penetrasi ideologi intoleran dan radikal, tetapi juga membekali mereka dengan nalar etis untuk menghadapi perbedaan secara konstruktif (Badrun et al., 2023). Hal ini diperkuat dengan model-model pembelajaran yang menekankan pada dialog antarbudaya, studi kasus sosial, serta praktik pembiasaan nilai dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Ketika nilai-nilai moderasi diinternalisasikan secara konsisten melalui pendidikan, maka pendidikan agama menjadi instrumen efektif dalam membentuk identitas kebangsaan yang utuh yaitu identitas keislaman yang berakar pada tradisi, namun terbuka terhadap kemajuan dan kemajemukan.

Dengan demikian, implikasi dari penguatan moderasi beragama melalui pendidikan agama tidak hanya bersifat individual dalam membentuk karakter personal siswa, tetapi juga bersifat kolektif dalam menopang fondasi kebangsaan yang damai dan berkeadaban. Pendidikan agama yang integratif dan moderat menjadi titik temu antara religiositas dan nasionalisme, sekaligus menjadi ruang reproduksi nilai-nilai publik yang memperkuat ketahanan ideologis generasi muda di tengah tantangan globalisasi dan fragmentasi identitas.

5.2 Perlu Adanya Sinergi Antara Instrumen Struktural (Kurikulum, Kebijakan), Kultural (Budaya Sekolah), Dan Personal (Guru Dan Peserta Didik)

Efektivitas internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pendidikan Islam sangat ditentukan oleh sinergi antara tiga pilar utama pendidikan, yakni instrumen struktural, kultural, dan personal. Instrumen struktural merujuk pada kebijakan pendidikan nasional, kurikulum, dan regulasi yang menjadi kerangka formal dalam pelaksanaan pendidikan (Hikmah & Ernawati, 2023). Kurikulum yang responsif terhadap nilai-nilai kebinekaan, serta kebijakan yang menegaskan urgensi moderasi beragama seperti yang tertuang dalam *Renstra Kemenag 2020–2024* dan *SK Dirjen Pendis No. 7272/2019* berfungsi sebagai fondasi normatif yang mengarahkan lembaga pendidikan dalam menyusun strategi pembelajaran yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada karakter. Namun, struktur kebijakan ini tidak akan bermakna bila tidak didukung oleh budaya sekolah yang mendukung praktik-praktik keberagaman yang inklusif, dialogis, dan penuh penghargaan terhadap perbedaan.

Budaya sekolah berperan sebagai instrumen kultural yang merefleksikan nilai-nilai yang hidup dalam keseharian peserta didik. Sebagaimana ditegaskan dalam temuan (Nurdaeni et al., 2024), pembiasaan nilai-nilai Pancasila dan Islam rahmatan lil 'ālamīn melalui kegiatan rutin, keteladanan guru, serta relasi sosial yang konstruktif menjadi medium penting dalam membentuk lingkungan belajar yang sehat dan moderat. Budaya yang dikembangkan secara sadar oleh sekolah akan memperkuat daya serap siswa terhadap nilai-nilai yang diajarkan secara formal melalui kurikulum, menciptakan kohesi antara apa yang dikatakan, diajarkan, dan dijalankan.

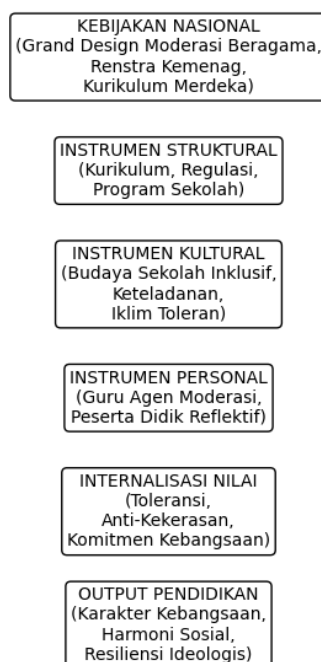
Penguatan Moderasi Beragama pada Pendidikan di Indonesia

Yuni Armayanti, Zakiah Nasution

Selain itu, faktor personal dari aktor pendidikan khususnya guru dan peserta didik memegang peran vital dalam menjembatani antara kebijakan dan praksis. Guru sebagai pelaku utama pembelajaran harus memiliki kompetensi ideologis dan pedagogis yang memadai untuk menafsirkan nilai-nilai moderasi ke dalam kegiatan belajar yang kontekstual dan bermakna. Sementara itu, peserta didik perlu difasilitasi agar menjadi subjek aktif yang mampu merefleksikan pengalaman keberagamaannya dalam realitas sosial yang plural. Dengan demikian, hanya melalui keterpaduan antara kebijakan yang terstruktur, budaya sekolah yang progresif, dan peran personal yang transformatif, moderasi beragama dapat tumbuh menjadi kesadaran kolektif yang hidup dalam ekosistem pendidikan Islam di Indonesia.

5.3 Visualisasi Model dan Sintesis Hasil Penguatan Moderasi Beragama

Bagian ini menyajikan visualisasi hasil penelitian dalam bentuk model konseptual dan tabel sintesis guna memperjelas pola hubungan antar temuan serta memperkuat koherensi pembahasan



Gambar 1. Model Integratif Penguatan Moderasi Beragama dalam Pendidikan di Indonesia

Gambar 1 menggambarkan model integratif penguatan moderasi beragama dalam pendidikan di Indonesia yang menunjukkan keterkaitan sistemik antara kebijakan nasional, instrumen struktural, kultural, dan personal. Model ini menegaskan bahwa internalisasi nilai moderasi beragama berlangsung melalui proses berjenjang dan saling terkait, yang bermuara pada pembentukan karakter kebangsaan, toleransi, dan resiliensi ideologis peserta didik.

Tabel 1. Sintesis Hasil Kajian Penguatan Moderasi Beragama dalam Pendidikan

Dimensi Kunci	Temuan Inti	Implementasi Utama	Implikasi Pendidikan
Kebijakan & Kurikulum	Moderasi beragama telah menjadi agenda nasional, namun implementasinya bervariasi	Integrasi nilai moderasi dalam kurikulum dan regulasi satuan pendidikan	Penguatan karakter kebangsaan dan sikap toleran
Guru & Budaya Sekolah	Guru dan iklim sekolah berperan strategis dalam	Keteladanan, pembiasaan nilai, dan pembelajaran dialogis	Terbentuknya lingkungan belajar inklusif dan humanis

Penguatan Moderasi Beragama pada Pendidikan di Indonesia

Yuni Armayanti, Zakiah Nasution

Manajemen & Kelembagaan	internalisasi moderasi Kepemimpinan sekolah menentukan konsistensi implementasi moderasi	Kolaborasi kepala sekolah, guru, orang tua, dan komunitas	Keberlanjutan program moderasi beragama
Strategi Pedagogis	Pendekatan kontekstual lebih efektif dibanding pendekatan dogmatis	Pembelajaran reflektif, tematik, dan berbasis pengalaman	Penguatan literasi keagamaan moderat peserta didik
Dampak Pendidikan	Moderasi beragama berkontribusi pada pembentukan karakter kebangsaan	Pendidikan agama berorientasi wasathiyah	Harmoni sosial dan resiliensi ideologis

Untuk memperjelas pola hubungan antar temuan serta menunjukkan sintesis hasil kajian, penelitian ini menyajikan visualisasi dalam bentuk model konseptual dan tabel sintesis. Gambar 1 menggambarkan kerangka integratif penguatan moderasi beragama dalam pendidikan yang menempatkan kebijakan dan kurikulum sebagai instrumen struktural, budaya sekolah sebagai instrumen kultural, serta guru dan peserta didik sebagai instrumen personal yang saling berinteraksi secara dinamis. Visualisasi ini menegaskan bahwa internalisasi nilai-nilai moderasi beragama tidak berlangsung secara linear atau parsial, melainkan melalui proses sistemik yang melibatkan berbagai aktor dan dimensi dalam ekosistem pendidikan.

Selanjutnya Tabel 1 menyajikan sintesis temuan utama penelitian dengan merangkum dimensi analisis, bentuk implementasi, serta implikasi pendidikan dari penguatan moderasi beragama di satuan pendidikan. Tabel ini berfungsi sebagai alat analitis untuk memperlihatkan keterkaitan antara kebijakan, praktik pedagogis, budaya institusi, dan dampak pendidikan secara komprehensif. Tabel 1 menyajikan sintesis hasil kajian penguatan moderasi beragama dalam pendidikan yang menunjukkan bahwa keberhasilan internalisasi nilai moderasi dipengaruhi oleh sinergi antara kebijakan, peran guru dan budaya sekolah, manajemen kelembagaan, serta strategi pedagogis yang digunakan. Temuan ini menegaskan bahwa moderasi beragama tidak dapat diimplementasikan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan sistemik dan berkelanjutan guna membentuk karakter kebangsaan, sikap toleran, dan resiliensi ideologis peserta didik.

5.4 Kontribusi Terhadap Pengembangan Teori Pendidikan Islam Moderat Yang Kontekstual Dan Aplikatif Di Tengah Realitas Keberagaman Indonesia

Salah satu kontribusi penting dari penguatan moderasi beragama dalam pendidikan adalah terbentuknya fondasi teoretis baru yang mendukung pengembangan paradigma pendidikan Islam moderat yang kontekstual dan aplikatif, khususnya dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Selama ini, pendekatan dalam pendidikan Islam cenderung terjebak dalam dikotomi antara normatif-teologis dan sekular-pragmatis, yang pada akhirnya menghambat upaya integratif dalam menjawab tantangan sosial-keagamaan kontemporer (Wirian & Jf, 2025). Melalui integrasi nilai-nilai moderasi, seperti toleransi, keadilan, anti-kekerasan, dan keberagaman dalam pembelajaran agama, terbentuk landasan epistemologis yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman yakni pendidikan Islam yang berbasis pada maqāsid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariah) sekaligus berorientasi pada kemaslahatan sosial dan kohesi kebangsaan.

Paradigma ini menjadikan pendidikan Islam tidak sekadar sebagai instrumen transfer doktrin, melainkan sebagai wahana pembentukan kesadaran etis, tanggung jawab sosial, dan kemampuan berpikir reflektif dalam merespons keberagaman. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi sangat

Penguatan Moderasi Beragama pada Pendidikan di Indonesia

Yuni Armayanti, Zakiah Nasution

relevan karena pendidikan Islam dihadapkan pada realitas pluralitas agama, budaya, etnis, dan ideologi. Seperti dicontohkan dalam model-model praksis yang berhasil diimplementasikan pada madrasah (Raikhan & Moh. Nasrul Amin, 2023) maupun sekolah dasar berbasis Kurikulum Merdeka (Nurdaeni et al., 2024), pendekatan pendidikan Islam yang bersifat moderat dan kontekstual mampu mendorong transformasi budaya sekolah, memperkuat kapasitas guru, dan membentuk siswa sebagai agen harmoni sosial.

Secara teoretis, kerangka ini dapat diposisikan sebagai upaya artikulasi teori pendidikan Islam yang berakar pada tradisi keilmuan Islam klasik, tetapi terbuka terhadap pendekatan-pendekatan kontemporer seperti *transformative learning*, *critical pedagogy*, dan *intercultural education*. Hal ini tidak hanya memperkaya wacana pendidikan Islam dalam ranah akademik, tetapi juga memperluas ruang aplikatifnya dalam kebijakan pendidikan nasional. Dengan demikian, penguatan moderasi beragama dalam pendidikan tidak sekadar respons terhadap tantangan radikalisme, melainkan sekaligus kontribusi nyata dalam membangun teori pendidikan Islam yang relevan, berkelanjutan, dan berkontributif bagi perdamaian sosial di tengah realitas keberagaman bangsa.

Kesimpulan

Berdasarkan proses kajian pustaka yang sistematis terhadap berbagai sumber akademik, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu, artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan moderasi beragama dalam pendidikan di Indonesia merupakan agenda strategis yang menuntut pendekatan integratif dan berkelanjutan. Moderasi beragama tidak dapat dipahami semata sebagai konsep normatif, melainkan harus diinternalisasikan secara operasional melalui kebijakan pendidikan, praktik pedagogis, serta budaya kelembagaan yang mendukung pembentukan sikap keagamaan yang inklusif, toleran, dan berorientasi pada harmoni sosial.

Hasil sintesis kajian menunjukkan bahwa efektivitas penguatan moderasi beragama sangat ditentukan oleh sinergi antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat satuan pendidikan. Integrasi nilai-nilai moderasi dalam kurikulum, peran strategis guru sebagai agen internalisasi nilai, kepemimpinan sekolah yang visioner, serta penerapan strategi pembelajaran kontekstual dan reflektif terbukti menjadi faktor kunci dalam membangun ekosistem pendidikan yang moderat. Tanpa adanya keterpaduan antar unsur tersebut, implementasi moderasi beragama cenderung bersifat parsial dan kurang berdampak terhadap pembentukan karakter peserta didik.

Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas pendidik dan pengelola lembaga pendidikan melalui pelatihan berkelanjutan yang berorientasi pada pedagogi moderasi beragama. Selain itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang mendorong konsistensi implementasi moderasi beragama di berbagai jenjang pendidikan, baik melalui penguatan kurikulum, pengembangan budaya sekolah yang inklusif, maupun kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas. Secara teoretis, artikel ini berkontribusi dalam memperkaya kajian pendidikan Islam moderat dengan menawarkan model sintesis yang menempatkan moderasi beragama sebagai proses sistemik, bukan sekadar wacana normatif. Sementara itu, secara praktis, temuan ini dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan dan praktisi pendidikan dalam merancang strategi penguatan moderasi beragama yang kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan di tengah dinamika sosial keagamaan masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Afwadzi, B., & Miski, M. (2021). Religious Moderation In Indonesian Higher Educations: Literature Review. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 22(2), 203–231.
<https://doi.org/10.18860/ua.v22i2.13446>
- Alvian, R. A., & Ardhani, I. (2023). The Politics Of Moderate Islam In Indonesia: Between International Pressure and Domestic Contestations. In *Al-Jami'ah* (Vol. 61, Issue 1).
<https://doi.org/10.14421/ajis.2023.611.19-57>

Penguatan Moderasi Beragama pada Pendidikan di Indonesia

Yuni Armayanti, Zakiah Nasution

- Arif, K. M. (2021). Concept and Implementation of Religious Moderation in Indonesia. *Al-Risalah*, 12(1), 90–106. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i1.1212>
- Badrun, Sujadi, Warsah, I., Muttaqin, I., & Morganna, R. (2023). Pancasila, Islam, and Harmonising Socio-Cultural Conflict in Indonesia. *Al-Jami'ah*, 61(1), 137–156. <https://doi.org/10.14421/AJIS.2023.611.137-156>
- Daheri, M., Rohimin, R., Amin, A., Iqbal, M., & Warsah, I. (2023). Synergistic of Family, School, and Community Education In Strengthening Religious Moderation. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 10(1), 117–136. <https://doi.org/10.15408/tjems.v10i1.36028>
- Dwi Kurniawan, O. S. (2024). *The Influence Of Religious Education On Ideological Radicalization In Students*.
- Dzofir, M., & Nur, D. M. M. (2024). *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam Integration of Religious Moderation Values in Education at Islamic Boarding Schools : Building a Tolerant and Islamic Generation*. 19(2), 347–368. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v19i2.30681>
- Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative Content Analysis. *SAGE Open*, 4(1), 215824401452263. <https://doi.org/10.1177/2158244014522633>
- Fenton, A. J. (2016). Faith, intolerance, violence and bigotry: Legal and constitutional issues of freedom of religion in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 10(2), 181–212. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.2.181-212>
- Haris, A., Mardani, D. A., Kusnandar, E., & Anurrochim, M. (2024). *Strengthening Religious Moderation through the Merdeka Curriculum : The Role of Islamic Religious Education Teachers at Senior High School The founding fathers of Indonesia had devoted a masterpiece named Pancasila* . 22(3), 423–438. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v22i3.1858>
- Helmy, M. I., Kubro, A. D. J., & Ali, M. (2021). The Understanding of Islamic Moderation (wasatiyyah al-Islam) and the Hadiths on Inter-religious relations in the Javanese Pesantrens. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 377–401. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.377-401>
- Hikmah, I. I., & Ernawati, F. (2023). *Moderate Islamic Religious Education Through Religious Moderation Training*. 24(2), 369–380.
- Ikhwan, M., Azhar, Wahyudi, D., & Alfiyanto, A. (2023). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Memperkuat Moderasi Beragama di Indonesia. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 21(1), 1–15. <https://doi.org/10.30762/realita.v21i1.148>
- Imamuddin, M., & Kurniasari, R. (2024). *Implementation of the Program Moderation in Aceh Madrasas for Strengthening Religious*. 16, 5409–5421. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i4.5932>
- Kimmanen, A. (2022). Enhancing informed empathy as a key to promoting social justice in religious education classes. *Journal of Religious Education*, 70(1), 77–93. <https://doi.org/10.1007/s40839-022-00159-9>
- Lukin, A. (2017). Ideology and the text-in-context relation. *Functional Linguistics*, 4(1). <https://doi.org/10.1186/s40554-017-0050-8>
- Maharani, A. (2025). *Religious Moderation and Pluralism of Community Organizations : Challenges and Opportunities in Islamic Higher Education*. 983–991.
- Muchtar, A., & Sunhaji, S. (2022). Efforts to Erode Dichotomies Using Integrative Learning Models in Islamic Religious Education. *Fondatia*, 6(4), 1162–1172. <https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i4.2385>
- Mukhibat, M., Effendi, M., Setyawan, W. H., & Sutoyo, M. (2024). Development and evaluation of religious moderation education curriculum at higher education in Indonesia. *Cogent Education*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2302308>
- Nurdaeni, N. M., Indra, H., & Alim, A. (2024). Penguatan moderasi beragama pada peserta didik melalui kurikulum Merdeka. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(1), 91–102. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v17i1.14939>
- Nurul Laily Nuzulia, Abdul Jalil, M. A. (2024). *Modernisasi Pendidikan Islam Nusantara Dan Islam Berkemajuan Di Malang: Komparasi Konsep Pendidikan Nahdlatul Ulama Dan Pendidikan Muhammadiyah*. 9.
- Qoumas, Y. C., Hussain, R. B. B. M., & Rahim, R. A. B. A. (2024). the Dissemination of Religious

Penguatan Moderasi Beragama pada Pendidikan di Indonesia

Yuni Armayanti, Zakiah Nasution

Moderation Through the Policy of the Indonesian Ministry of Religious Affairs. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 12(1), 147–176.

<https://doi.org/10.21043/qijis.v12i1.27552>

Raikhan, & Moh. Nasrul Amin. (2023). Penguatan moderasi beragama: Revitalisasi guru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(3), 629–643. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i3.20917>

RF, F. Y., & Nursobah, A. (2024). Development of Islamic Religious Education Curriculum to Prepare Religious Attitudes, Moderate, Inclusive, and Cultured Attitudes. *Jurnal Inovasi Pendidikan Agama Islam (JIPAI)*, 3(1), 66–78. <https://doi.org/10.15575/jipai.v3i1.30883>

Subaidi. (2020). Strengthening Character Education in Indonesia: Implementing Values from Moderate Islam and the Pancasila. *Journal of Social Studies Education Research*, 11(2), 120–132.

Subchi, I., Zulkifli, Z., Latifa, R., & Sa'diyah, S. (2022). Religious Moderation in Indonesian Muslims. *Religions*, 13(5), 1–11. <https://doi.org/10.3390/rel13050451>

Togia, A., & Malliari, A. (2017). Research Methods in Library and Information Science. *Qualitative versus Quantitative Research*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.68749>

Wirian, O., & Jf, N. Z. (2025). *The Role Of Religious Moderation Education In Forming A Tolerant Generation In The Digital*. 6(1), 1120–1127.